

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di lapangan maka sebaiknya di kemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Secara objektif kondisi SDN 4 Labuhan Haji, maka penulis akan menguraikan secara terpisah, mulai dari letak geografis, sejarah singkat, visi dan misi dan struktur.

4.1.1. Letak Geografis

Untuk mengetahui letak geografis SDN 4 Labuhan Haji, penulis akan memaparkan letak geografis secara rinci. SDN 4 Labuhan Haji Berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Selong, kecamatan Labuhan Haji, Desa Labuhan Haji dengan kordinat Lintang dan Bujur $08^{\circ}.69^{\circ}$ LS $116^{\circ} 88^{\circ}$ BT, yang merupakan Jalan Hos Cokro Aminoto Dusun Mandar kode pos 83616.

4.1.2 Profil SDN 4 Labuhan Haji

Profil Sekolah

1. Identitas Sekolah

1	Nama Sekolah	:	SD NEGERI 4 LABUHAN HAJI
2	NPSN	:	50202122
3	Jenjang Pendidikan	:	SD
4	Status Sekolah	:	Negeri
5	Alamat Sekolah	:	DusunMandar
	RT / RW	:	1 / 1
	Kode Pos	:	83616

Kelurahan	:	Labuhan Haji
Kecamatan	:	Kec. Labuhan Haji
Kabupaten/Kota	:	Kab. Lombok Timur
Provinsi	:	Prov. Nusa Tenggara Barat
Negara	:	Indonesia
6 Posisi Geografis	:	-8.6988 Lintang
		116.5688 Bujur

4.1.3. Visi Dan Misi

1. Visi :

“Terwujudnya Insan Yang Cerdas, Berahlak Serta Nasionalis “

2. Misi :

- 1) Menanamkan Sikap Dan Tindakan Yang Bernuansa Agamis Dan Nasionalis
- 2) Mengadakan Pembelajaran Yang Berkualitas
- 3) Peningkatan Kegiatan Intra Dan Ekstra Kulikuler
- 4) Pemantapan Calistung Di Kelas Rendah

4.1.4. Fungsi Guru Sekolah Dasar Negeri 4 Labuhan Haji

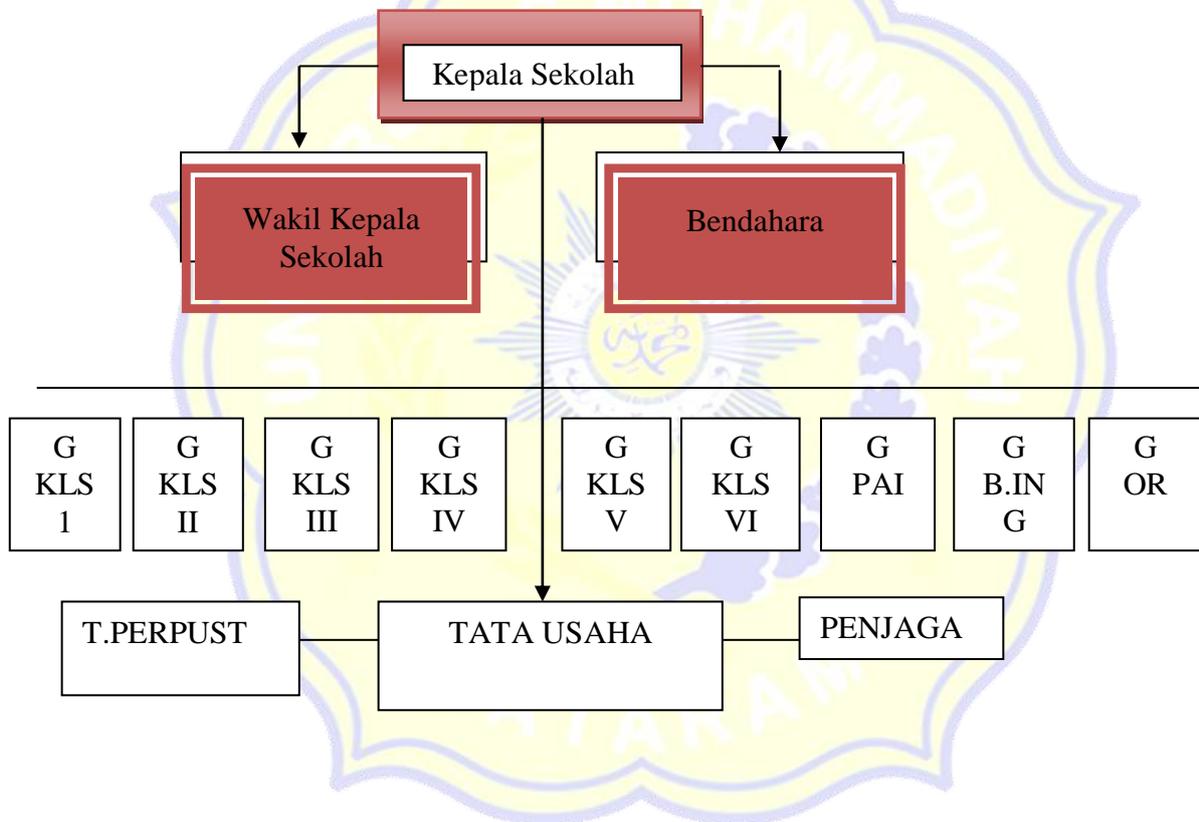
- A. Guru Mengelola Pembelajaran
- B. Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan tugas belajar mengajar secara efektif dan efisien.
- C. Tugas dan tanggung jawab guru meliputi :
 1. Menyusun program tahunan
 2. Menyusun program satuan pelajaran
 3. Menyusun program mingguan / bulanan
 4. Menyusun program ulangan harian

D. Guru Bertugas Untuk Menyusun Program Pembelajaran/Pendidikan

Siswa Untuk Mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan.

1. Ulangan Harian
2. Ulangan Tengah Semester
3. Ulangan Akhir Semester
4. Ulangan Kenaikan Kelas

4.1.5. Struktur SDN 4 Labuhan Haji



4.1.6 Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD NEGERI 4 LABUHAN HAJI

Kecamatan Kec. Labuhan Haji, Kabupaten Kab. Lombok Timur,
Provinsi Prov. Nusa Tenggara Barat

Tanggal Unduh:

2021-01-20

Pengunduh: Syofian Hadi

10:20:34

(syofian.hadi85@yahoo.co.id)

No	Nama	NUPTK	JK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	NIP	Status Kepegawaian	Jenis PTK				
									Gelar Depan	Gelar Belakang	Jenjang	Jurusan/Prodi
1	Dewi Sartika	7433766667130392	P	Pancor	1988-01-01		Honor Daerah TK.II Kab/Kota	Guru Mapel	S.Pd.I		S1	Pendidikan Agama Islam
2	Kamistiani Khairul	8053738640300003	P	Pancor	1960-07-21	196007211980122004	PNS	Guru Kelas	S.Pd, S.Pd		S1	Guru Kelas SD/MI
3	Hidayat	7942762663130242	L	Labuhan Haji	1984-06-10	198406102019021001	CPNS	Guru Kelas	S.Pd		S1	Guru Kelas SD/MI
4	Musabbihan Rema	1563744648300193	P	Loang Tuna	1966-12-31	196612311989112017	PNS	Guru Kelas	S.Pd, S.Pd		S1	Guru Kelas SD/MI
5	Febriyanti	6560764665130152	P	Labuhan Haji	1986-02-28		Tenaga Honor Sekolah	Guru Mapel	S.Pd		S1	Guru Kelas SD/MI
6	Rusnawati	8957761662300012	P	Tanjung	1983-06-25	198306252014062005	PNS	Guru Kelas	A.Ma.Pd, A.Ma.Pd, S.Pd		S1	Guru Kelas SD/MI
7	Sudusiati	9147740641300013	P	Kelayu	1962-08-15	196208151982032013	PNS	Guru Kelas Kepala	S.Pd, S.Pd		S1	Guru Kelas SD/MI
8	Sulbiyana	3536750650300002	P	LABUHAN HAJI	1969-02-04	196902041991022001	PNS	Sekolah	S.Pd		S1	Guru Kelas SD/MI
9	Syafruddin	6456750652200023	L	Kelayu	1972-11-24	197211242007011011	PNS	Guru Kelas	S.Pd		S1	Guru Kelas SD/MI
10	Syofian Hadi		L	Labuhan	1985-		Honor Daerah	Tenaga			SMA /	Lainnya

			Haji	06-19		TK.II Kab/Kota	Administrasi Sekolah		sederajat	
11	Wirja Ahyadi	2435771672130083	L	Tanjung	1993-11-03	Guru Honor Sekolah	Guru Mapel	S.Pd	S1	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Tabel 4.1Daftar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sd Negeri 4 Labuhan Haji



4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri 4 Labuhan Haji

Kebijakan Sertifikasi Guru ini merupakan cara untuk meningkatkan mutu pendidikan dimana dengan terjadinya perkembangan pada pendidikan itu mengakibatkan peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang di selenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Tenaga Kepedidindikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Proses sertifikasi guru dilaksanakan melalui berbagai pola yaitu pola sertifikasi penilaian Porto Folio (PF), pola sertifikasi pemberian langsung (PSPL) dan Pola Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Profesfesi Guru (PLPG). Program sertifikasi Guru sudah dimulai sejak tahun 2006 bertujuan untuk melakukan perencanaan, mensosialisasikan, menguji kompetensi dan untuk pendataan telah dilakukan sejak tahun 2006.

Pada tahun 2008 Sekolah Dasar Negeri 4 Labuhan Haji Mengikuti Program Sertifikasi yang di selenggarakan oleh LPTK sebagai lembaga yang menguji dan mengeluarkan sertifikat pendidik bagi para guru, LPMP sebagai lembaga yang memberika persetujuan daftar calon guru tersertifikasi dan mengontrol jalannya sertifikasi guru di tingkat daerah,, sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan sosialisasi, menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi, dan pendataan beserta pengecekan biodata guru dan

sebagainya. Bagi para informan lembaga-lembaga yang menangani kebijakan sertifikasi guru sudah tepat dan sudah menjalankan tugas yang ditetapkan dalam petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru.

Pada bagian ini akan di bahas dan dianalisis mengenai hasil wawancara penelitian ke dalam kategori penarikan kesimpulan secara induktif. Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa program Sertifikasi guru terdapat beberapa variabel yakni Implementasi Kebijakan dalam proses *Sertifikasi* di Lombok Timur tepatnya pada Sekolah dasar Negeri 4 Labuhan Haji yang telah di teliti dan untuk mengetahui terlaksananya implementasi program seritifikasi guru dapat diukur dengan enam variabel dari Van Mater dan Van Horn yang diteliti pada masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

program sertifikasi untuk meningkatkan kualitas guru yang baik yaitu harus dapat menjawab keinginan dan pertanyaan murid dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi yang baik, sehingga setiap yang datang murid dapat dengan mudah memahami setiap pernyataan ataupun pertanyaan yang diberikan. Oleh karena itu program sertifikasi di buat untuk mampu menjawab setiap perkembangan yang dibutuhkan oleh guru dan murid setiap saat secara konsisten, bijak dan berstandar tinggi. Program Sertifikasi harus dapat memberikan dampak yang baik sehingga setiap guru bisa berkualitas.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Mussabihan, S.Pd selaku Guru Tersertifikasi Sekolah Dasar Negeri 4 Labuhan Haji bahwa :

“Program Sertifikasi ini adalah poin untuk menjadikan acuan bahwa terciptanya Pendidikan yang berhasil itu karna telah memenuhi standar yang baik dan sangat mendukung terciptanya guru yang profesional dan kompeten, Program Sertifikasi ini juga menjadi suatu syarat bagi setiap guru untuk mewujudkan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan serta

cita-cita bangsa yang dimana tujuan ada nya Sertifikasi ini juga untuk membantu pemerintah Mewujudkan Pendidikan Indonesia Menjadi lebih baik lagi sesuai dengan prosedur yang baik” (Wawancara Tgl 22 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses sertifikasi guru ini adalah sistem yang sangat membantu, dan juga tidak terlalu memberatkan karna sistemnya yang sanagt meringankan dari panitia penyelenggara dan, dimana semua prosesnya pun di lakukan secara Terencana dan Sistematis, dimana sistem ini sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan Guru yang Berkualitas dan kompeten.

2. Sumber Daya Manusia

Didalam keberhasilan penguatan implementasi kebijakan lebih tergantung dari kemampuan mengelola sumber daya yang tersedia. Manusia atau masyarakat merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan. dari beberapa implementasi yang mewajibkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan pada kebijakan yang sudah ditetapkan secara apolitik.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Sulbiyana, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Labuhan Haji bahwa :

“guru sebagai pengajar atau pendidik merupakan salah satu penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia. Guru merupakan komponen yang berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, sehingga kemampuan atau kompetensi profesional dari seorang guru sangat menentukan mutu pendidikan “(hasil wawancara pada 21 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa :

Sumber daya manusia merupakan ujung tombak supaya mampu bersaing karena Tanpa adanya pendidikan yang memadai dan berkualitas, maka bangsa Indonesia akan semakin tertinggal di buritan peradaban. SDM salah satu hal penting untuk memajukan pendidikan adalah adanya guru guru yang profesional dan kompeten.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Kebijakan publik dapat terlaksana dengan baik Menurut Van Meter dan Van Horn (Dalam Widodo 1974) sehingga apapun yang menjadi standar tujuan harus bisa di mengerti/dipahami oleh setiap individu (Implementors). Yang bertanggung jawab dengan pencapaian standar dan tujuan kebijakan, oleh karena itu standar dan tujuan harus dapat dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi serta penyampaian yang diberikan kepada para pelaksana harus beragam dan tertata sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh para pelaksana kebijakan itu sendiri.

Komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan mengenai implementasi kebijakan dalam meningkatkan program sertifikasi guru di SDN 4 Labuhan Haji sudah dikatakan berjalan dengan efektif apabila adanya pertemuan dengan implementor, sehingga pelaksanaan dalam prosesnya optimal ketika para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya para pelaksana kebijakan lakukan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan ini memang membutuhkan keterbukaan atau kejelasan sehingga

tidak terjadi yang namanya miss komunikasi atau tanggapan yang berbeda dalam menyampaikan atau memberikan informasi kebijakan program sertifikasi .

Menurut hasil wawancara dengan ibu Sulbiyana, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Labuhan Haji bahwa :

“Dan apabila para guru sertifikasi kesulitan dalam memahami informasi kami siap membantu, Pada saat pengisian mungkin ada berkas-berkas yang belum terbawa atau belum lengkap dan mereka memiliki kesulitan Mereka disediakan informasi yang lengkap oleh pihak sekolah dan lembaga penyelenggara. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Januari 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang diberikan oleh pihak pelaksana sudah diberikan dengan sebaik mungkin dalam memberikan pemberitahuan sehingga para penerima kebijakan memahami setiap alur pelayanan yang diberikan oleh lembaga LPMP Lombok Timur.

4. Karakteristik agen Pelaksana

Sejauh hasil temuan tidak menemukan masalah dan kendala yang berarti. Guru sangat memahami maksud dan tujuan kebijakan dengan baik. Dengan demikian berarti proses transfer informasi tentang isi kebijakan tersampaikan dengan baik, sehingga tidak ada *miss* dan *defisit* pemahaman terhadap maksud dan tujuan kebijakan dicanangkan. Sedangkan faktor sikap dengan indikator komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi kalau pelaksana tidak berkomitmen menjalankan kebijakan sertifikasi baik di tingkat LPTK. Sehingga

komitmen agen pelaksana kebijakan sangat tinggi, komitmen yang tinggi ini juga bisa dilihat dari kepatuhan agen pelaksana kebijakan menjalankan tugas yang sudah diamanahkan oleh pimpinan dan organisasi dengan sungguh sungguh berdasar ketentuan yang berlaku. Sehingga tingkat kepatuhan terhadap ketentuan kebijakan sangat tinggi.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Sulbiyana, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Labuhan Haji bahwa :

“Kami pun melakukan Rapat Koordinasi 1 dan 2, dan juga melakukan pertemuan Evaluasi yang di lakukan 2x dalam satu tahun, oleh guru maupun para staff untuk mengevaluasi guru yg tersertifikasi apakah sudah ada peningkatan . (Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti melihat bahwa karakteristik agen pelaksana menurut implementasi kebijakan dalam Program Sertifikasi guru di SDN 4 Labuhan Haji sudah terlaksana dengan baik, dengan memberikan ruang bagi para guru untuk keterbukaan komunikasi dari kepala sekolah .

5. Kondisi Sosial Ekonomi Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn (Dalam Agustino, 2012 : 144) bahwa variabel ini merupakan sejauhmana kondisi lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah dilakukan, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi salah satu kendala dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan . Lingkungan eksternal juga perlu dilihat dalam proses implementasi, sehingga dapat mengetahui sejauh mana lingkungan ekonomi, sosisa, dan

politik dapat mendorong keberhasilan suatu kebijakan publik dalam program sertifikasi . Lingkungan eksternal seperti lingkungan yang ada di masyarakat sekitar, seperti halnya dukungan masyarakat supaya bagaimana dalam melakukan program impementasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas guru sudah berjalan dengan baik atau tidaknya.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Sulbiyana, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Labuhan Haji bahwa :

“Pelaksanaan sertifikasi di SDN 4 Labuhan Haji kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat setempat karena sasaran dari pelaksanaan kebijakan ini adalah guru. Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan timbulnya sikap tidak peduli dari golongan tersebut. Bentuk partisipasi yang diberikan terpusat melalui rapat komite, itupun hanya dihadiri oleh sedikit orang tua wali murid disebabkan kesibukan mereka untuk meningkatkan pendapatan. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat yang berperilaku seperti di atas. Ada sebagian orang tua yang membentarkan perhatian khusus kepada anak – anak mereka dengan cara menghubungi langsung wali kelas ataupun guru yang mereka kenali. Kecendrungan seperti contoh di atas tidak lepas dari latar belakang sosial dan pendidikan masyarakat setempat yang memang masih tertinggal dari dunia global.” (Wawancara 22 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan program sertifikasi dalam meningkatkan kualitas guru di SDN 4 Labuhan Haji Dukungan eksternal dari masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program yang baik, sehingga dari pernyataan tersebut bisa dilihat dari lingkungan sosial, ekonomi dan politiknya belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam meng implementasikan program yang berjalan dengan optimal. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur atau perbandingan dari teori Van Meter dan Van Horn dengan program sertifikasi bahwa kondisi sosial

ekonomi maupun perhatian dari pendekatan ini sama, dengan adanya sikap perhatian yang baik dari pihak pelaksana.

6. Sikap/kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Agustinus : 2006) sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilakukan bukan hasil formulasi yang mengenal betul permasalahan dan persoalan dari pengguna program yang telah di rasakan. Melainkan kebijakan publik yang bersifat top down sehingga sangat mungkin para pengambil kebijakan tidak mengetahui bahkan tidak mampu memegang kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus di selesaikan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syofian Hadi selaku TU Sekolah Dasar Negeri 4 Labuhan Haji bahwa :

“kalau di SDN 4 Labuhan Haji sudah baik. Semuanya sudah mudah, alur programnya juga sudah jelas di SDN 4 Labuhan Haji ini. Jadi kita sebagai guru juga tahu kemana saja alur programnya , namun demikian, banyak guru yang belum siap melaksanakan kebijakan sertifikasi guru (berkualifikasi dibawah S1/DIV) pada saat sertifikasi mulai dicanangkan sehingga banyak guru yang harus kuliah terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikasi guru. Adapun permasalahan lainnya yaitu banyak Guru kehilangan SK pengangkatan yang harus dilampirkan dari mulai SK pengangkatan awal sampai terakhir (Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa :

Guru di Sekolah Dasar Negeri 4 Labuhan haji dicanangkan rata-rata tidak siap, hal ini dikarenakan guru yang berkualifikasi dibawah S1/DIV masih sangat banyak, sehingga para guru harus

menempuh pendidikan S1/DIV demi mendapatkan sertifikasi guru. Ketidak siapan yang terjadi sampai saat ini terkait administrasi seperti ketidaksiapan pengumpulan dokumen seperti piagam, sertifikat pendampingan, SK dari awal pengangkatan sampai terakhir yang terkadang sulit untuk dicari kembali bahkan tidak jarang yang hilang, sulitnya mengumpulkan dokumen tersebut ditambah dengan waktu yang diberikan sangat pendek yaitu satu minggu untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, berdasarkan wawancara, kebijakan sertifikasi guru merupakan kebijakan pertama yang dicanagkan oleh pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas dan mutu pendidik melalui pemberian sertifikat pendidik disertai tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji gurudan diberikan selama empat kali dalam satu tahun.

4.2.1. Persyaratan Program Sertifikasi Guru SDN 4 Labuhan Haji

Proses Implementasi Kebijakan Sertifikasi guru Menurut Masnur Muslich (2007:2), sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak, Adapun beberapa syarat Sertifikasi sebagai berikut :

1. Persyaratan sertifikasi guru 2017 :

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV).
- b. Guru Dalam Jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015.
- c. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- d. Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2017.
- f. Berkualifikasi akademik Sarjana/Diploma Empat yang sesuai dengan bidang studi pada PPG yang akan diikuti.
- g. Bebas Napza.
- h. Sehat jasmani dan rohani (jiwa).
- i. Berkelakuan baik.

1. Persyaratan dokumen 2017:

1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan Ijazah, Kopertis, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi, atau Notaris.
2. Fotokopi SK Pengangkatan Pertama dan 5 (lima) tahun terakhir bagi:
 1. Guru PNS dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;

2. PNS yang ditugaskan sebagai Guru dari Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;
3. Guru GTY dari Yayasan sebagai Guru Tetap Yayasan paling sedikit 2 tahun terakhir secara berturut-turut dilegalisasi oleh Ketua Yayasan;
4. Guru bukan PNS di sekolah negeri dari Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;
3. Bukti pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka bagi guru bukan PNS di sekolah negeri dari Kepala Sekolah;
4. Surat izin untuk mengikuti program PPG:
 1. Bagi PNS diperoleh dari Pejabat yang berwenang
 2. Bagi GTY diperoleh dari Ketua Yayasan
 3. Bagi guru bukan PNS di sekolah negeri diperoleh dari Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan
 4. Surat keterangan Bebas Napza dari BNN atau yang berwenang;
 5. Surat keterangan Sehat jasmani dan rohani (jiwa) dari dokter rumah sakit pemerintah;
 6. Surat keterangan Berkelakuan baik dari kepolisian.

4.2.2. Prinsip-Prinsip Program Sertifikasi Guru di SDN 4 Labuhan haji

1. Dilaksanakan Secara Objektif,Transparan,dan Akuntabilitas.

- a. Objektif yaitu Mengacu pada proses perolehan sertifikat pendidik yang imparial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidik nasional.
 - b. Transparan yaitu mengacu pada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidik untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil Sertifikasi guru.
 - c. Akuntabilitas yaitu proses sertifikasi guru yang dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidik secara administratif, finansial, dan akademik.
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidik nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan telah memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan. dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di indonesia secara berkelanjutan.
 3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang karna sertifikasi guru dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 4. Dilaksanakan Secara Terencana Dan Sistematis sehingga tercapai pelaksanaan program sertifikasi itu secara efektif dan efisien harus direncanakan secara sistematis dan matang.

5. Jumlah Peserta Sertifikasi di batasi oleh pemerintah karena pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi guru, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan kuota tersebut di dasarkan atas jumlah individu guru per kabupaten/kota yang dimasukkan di pusat data Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

4.2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Program Sertifikasi Guru di SDN 4 Labuhan Haji

Penelitian ini memfokuskan pad tiga variabel berpengaruh (*dependent*), yaitu; faktor sikap, sumber daya dan hubungan antarorganisasi yang akan di bahas secara berurutan sebagai berikut:

4.2.4.1 Sumber daya.

Faktor sumber daya, khususnya yang berkait dengan SDM, baik di tingkat LPTK maupun Dinas Pendidikan Kota tidak mengalami masalah dari sisi kuantitas dan kualitas pelaksana. Ketersediaan SDM yang memadai dalam menjalankan kebijakan sertifikasi di Kabupaten Lombok Timur merupakan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Faktor sumber daya finansial yang menjadi penghambat adalah berkait dengan mekanisme penganggaran khususnya yang ada di Dinas Pendidikan Lombok Timur.

Sedangkan faktor sumber daya fasilitas sarana prasarana mengalami kendala berkait dengan keterbatasan infrastruktur fasilitas sarana prasarana baik di LPTK dan Dinas Pendidikan. Masing-masing instansi mengalami

masalah terutama berkait dengan tidak adanya sarana prasarana pendukung pelaksanaan program, diantaranya seperti fasilitas komputer, IT, dan gudang penyimpanan dokumen penting yang berhubungan dengan sertifikasi.

4.2.4.2 Faktor Sikap pelaksana

Sejauh hasil temuan tidak menemukan masalah dan kendala yang berarti. Guru sangat memahami maksud dan tujuan kebijakan dengan baik. Dengan demikian berarti proses transfer informasi tentang isi kebijakan tersampaikan dengan baik, sehingga tidak ada *miss* dan *defisit* pemahaman terhadap maksud dan tujuan kebijakan dicanangkan. Sedangkan faktor sikap dengan indikator komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi kalau pelaksana tidak berkomitmen menjalankan kebijakan sertifikasi baik di tingkat LPTK. Sehingga komitmen agen pelaksana kebijakan sangat tinggi, komitmen yang tinggi ini juga bisa dilihat dari kepatuhan agen pelaksana kebijakan menjalankan tugas yang sudah diamanahkan oleh pimpinan dan organisasi dengan sungguh sungguh berdasar ketentuan yang berlaku. Sehingga tingkat kepatuhan terhadap ketentuan kebijakan sangat tinggi.

4.2.4.3 Hubungan Antarorganisasi

Dengan indikator struktur birokrasi/banyaknya instansi yang terlibat dalam sertifikasi guru, masing-masing instansi tidak mempermasalahkan selama ada kejelasan tugas dan fungsi yang dijalankan. Meskipun banyak instansi yang terlibat di dalam proses pelaksanaan sertifikasi guru, proses pelaksanaannya di SDN 4 Labuhan Haji tidak mengalami kendala,

semua berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Proses komunikasi dan koordinasi antarinstansi berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan aturan yang ada.

4.2.4. Dampak Sertifikasi Guru Di Sekolah Dasar Negara 4 Labuhan Haji

Untuk mengetahui dampak dari kebijakan sertifikasi pada guru SD Labuhan Haji dapat dilihat melalui tanggapan-tanggapan informan yang dianggap representatif dan observasi yang didapat di lapangan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara terperinci berdasarkan hasil

1. Dampak yang dikehendaki

Sertifikasi guru adalah sebuah upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Dengan adanya sertifikasi guru ini, maka tentu ada dampak yang dikehendaki baik oleh pemerintah, maupun dari guru itu sendiri. Dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru adalah hasil dari adanya kebijakan yang diharapkan oleh para guru penerima tunjangan profesional guru. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru mencakup; a) kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik, b) guru lebih profesional dan disiplin, dan c) meningkatkannya kesejahteraan dan martabat guru.

a. Kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik

Melihat pentingnya posisi guru dalam dunia pendidikan, maka sumber daya manusia (SDM) yang unggul adalah hal mutlak dalam proses pembelajaran.

Seorang guru harus memenuhi standar pendidik yang dapat dicapai dengan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Hal ini tak bisa ditawar karena sudah diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang memberi pengakuan bahwa guru

adalah tenaga profesional, dan kepadanya diberi sumber penghasilan (tunjangan sertifikasi guru) atas keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang telah memenuhi standar mutu pendidikan.

b. Guru lebih profesional dan disiplin

Sertifikasi guru merupakan suatu langkah yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan guru. Para guru sertifikasi di samping sudah memperoleh beragam pelatihan selama program sertifikasi yang diikutinya juga mendapat tambahan tunjangan profesi yang diharapkan dapat membuatnya lebih disiplin dalam mengajar. Dengan adanya kebijakan program sertifikasi guru, saya semakin lebih giat mengajar, membuat perangkat dan analisis mengajar menjadi lebih lengkap, lebih disiplin dalam

mengajar, lebih giat menambah pengetahuan, mengajar 24 jam pelajaran seminggu

2. Dampak Aktual

Dampak aktual dari kebijakan sertifikasi guru adalah hasil yang muncul selain dari yang dikehendaki oleh para guru penerima tunjangan profesi guru misalnya guru lebih konsumtif serta beban kerja guru semakin bertambah. Sesungguhnya sangat wajar dan masuk akal apabila guru mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan beratnya beban tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Dengan penghasilan yang layak diharapkan kinerja dan profesionalisme guru juga kian meningkat. Mereka bisa fokus dan total dalam memberikan bekal keilmuan secara optimal kepada peserta didiknya.

Dampak kebijakan muncul setelah kita mengetahui bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Untuk itu, pada penelitian ini akan dibahas tentang dampak apa saja yang ada pada kebijakan serifikasi guru yang dilaksanakan di SDN 4 Labuhan Haji. Dampak merupakan hasil dari adanya kebijakan yang ada, entah itu dampak yang diharapkan oleh publik maupun dampak yang tidak diharapkan.

Dampak sertifikasi guru yang ada di SDN 4 Labuhan Haji bisa dilihat dari:

- 1) Kemampuan dan Kompetensi Guru Menjadi Lebih Baik. Kemampuan dan kompetensi guru merupakan tujuan dari adanya sertifikasi guru agar bisa

lebihbaik lagi. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru merupakan dampak yang dikehendaki dari adanya sertifikasi guru. Peningkatan kemampuan guru misalnya kemampuan guru dalam mendalami materi pelajaran. Jika guru mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami mata pelajaran dan mengajar maka proses KBM akan berjalan dengan lancar dan juga siswa-siswi memahami apa yang disampaikan oleh guru dan tujuan guru yaitu mentranfer ilmu terlaksana dengan baik. Dampak dari kebijakan sertifikasi guru yang lain ialah meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru, misalnya kompetensi penguasaan materi. Selain itu, komunikasi sesama guru menjadi lebih baik, karena komunikasi sesama guru mata pelajaran untuk memahami materi baru sangat penting. Dengan melakukan diskusi akan lebih mudah memahami materi yang sulit karena guru bisa saling tukar pendapat untuk memahami materi yang susah. Dengan demikian, peningkatan kompetensi penguasaan materi pelajaran menjadi lebih mudah. Dari dampak kebijakan sertifikasi guru yang untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru merupakan dampak yang dikehendaki karena membawa dampak positif dalam kemajuan pendidikan di Indonesia.

- 2) Guru Lebih Profesional Dan Disiplin Dalam Profesinya. Kedisiplinan guru dan sikap profesionalisme guru merupakan kriteria efektifitas pelaksanaan sertifikasi guru. Dampaknya bisa dilihat dari peraturan yang mewajibkan guru untuk mengajar 24jam/minggu merupakan salah satu bentuk kedisiplinan dalam megajar karena setiap guru yang sudah tersertifikasi

mempunyai kewajiban yang sama untuk menuntaskan 24jam/minggu. Dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh setiap guru dalam mengajar maka akan berdampak positif pada pekerjaan guru untuk mentransfer ilmu yang dimiliki. Guru sendiri juga akan merasa disiplin untuk menyelesaikan pekerjaannya karena yang lain juga melakukan kewajiban yang sama, sehingga rasa kedisiplinan guru menjadi terasa. Kedisiplinan yang dimiliki oleh guru akan berdampak pada citra guru yang akan lebih profesional dari sebelumnya. Karena setiap pekerjaan guru bisa selesai dengan baik karena sikap disiplin untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimiliki menjadikan profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik menjadi lebih baik. Guru akan menjadi lebih profesional karena guru dapat menyelesaikan pekerjaan yang dimiliki terselesaikan.

3) Meningkatkan Kesejahteraan Dan Martabat Guru. Sertifikasi guru yang memberikan tunjangan untuk membantu meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam materi pelajaran dan proses belajar mengajar namun berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan guru. Bisa dilihat dari adanya tambahan tunjangan yang diberikan bisa digunakan untuk membeli buku penunjang maupun untuk melakukan penelitian. Selain itu gaji yang diterima tidak akan berkurang dengan pembelian buku penunjang materi karena untuk membelinya sudah didapat dari tunjangan yang diberikan. Selain itu, jika dilihat sekarang ini banyak guru yang memiliki laptop untuk menunjang pekerjaannya karena kemajuan IT saat ini. Dengan begitu kesejahteraan guru tidak hanya gaji yang akan bertambah tetapi juga

banyaknya alat penunjang yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai tenaga pendidik adalah bentuk dari kata kesejahteraan. Dengan demikian guru bisa dikatakan sejahtera jika dalam pekerjaan tidak menemukan hambatan dan juga mendapatkan tambahan gaji atas pengakuan yang diterima dari hasil kerja kerasnya dalam mentransfer nilai kepada siswa-siswinya. Kesejahteraan guru merupakan dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru karena sebelum adanya sertifikasi guru, pekerjaan guru yang mulai dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena kurang mendapat tantangan dalam bekerja yang tidak seperti dokter atau TNI/Polri yang dalam bekerja mendapat tantangan dan kadang hambatan.

- 4) Dampak dari kebijakan sertifikasi guru yang menjadikan guru menjadi lebih termotivasi ialah bisa dilihat dari tabel daftar guru SDN 4 Labuhan haji yang sudah sertifikasi. Dalam tabel ini, guru yang setiap tahunnya bertambah selisih jumlah yang sudah sertifikasi. Misalnya pada tahun 2008 guru yang sertifikasi berjumlah 5 orang, selanjutnya guru menjadi termotivasi untuk mengikuti sertifikasi guru dan pada tahun 2009 guru yang sertifikasi menjadi lebih banyak dari pada tahun 2008 menjadi 10 orang. Tahun berikutnya di SDN 4 Labuhan Haji jumlah guru yang mengikuti sertifikasi guru menjadi lebih banyak. Hanya pada tahun 2013, 2014, dan 2015 terdapat masing-masing guru yang mengikuti sertifikasi guru karena sudah tidak ada guru lagi yang bisa mengikuti pendaftaran sertifikasi guru. Jadi secara tidak langsung program sertifikasi guru ini

memotivasi guru untuk mengikuti kebijakan guru yang dicanangkan oleh pemerintah. Kebijakan sertifikasi guru dapat memotivasi guru dikarenakan dalam program ini guru di tuntut untuk lebih unggul dalam kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Misalnya kemampuan guru dalam penguasaan teknologi informasi saat ini. Dengan kemajuan IT internet merupakan sarana penunjang bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Email merupakan salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan guru untuk mempermudah pekerjaannya dengan menggunakannya untuk mengumpulkan tugas dari siswa-siswi. Sehingga guru-guru yang sudah senior bisa termotivasi untuk menggunakan email yang dimiliki untuk mengumpulkan tugas siswa-siswi dan tidak hanya mempunyai email saja tapi juga bisa digunakan dalam kesehariannya. Oleh sebab itu, guru menjadi termotivasi untuk belajar menambah wawasan yang ada agar bisa mengikuti perkembangan saat ini, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 5) Kebijakan sertifikasi guru memiliki tujuan ialah agar profesi guru sebagai tenaga pendidik mendapatkan pengakuan dan tidak dipandang sebelah mata. Kebijakan ini ada, sebab profesi guru kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam peningkatan pendidikan. Untuk itu, guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan menjadi lebih termotivasi karena adanya dampak dari pengakuan atas kinerja guru. Pengakuan terhadap kinerja guru menjadikan guru menjadi lebih termotivasi dalam mengajar karena apa yang dikerjakan oleh guru mendapat pengakuan dari

pemerintah. Pengakuan yang diberikan pemerintah terhadap tenaga pendidik yang merupakan apa yang dicita-citakan oleh kebanyakan guru karena guru sebagai tenaga pendidik bisa lebih leluasa untuk mentransfer ilmu kepada siswa-siswi.

6) Guru Menjadi Individu Lebih Konsuntif. Sertifikasi guru yang memberikan tunjangan bagi guru dengan tambahan sekali gaji tiap 3bulan sekali, akan memanfaatkan tunjangan tersebut untuk urusan guru dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Jika tunjangan yang ada digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti kredit motor baru, kredit mobil, dan lain sebagainya maka tujuan tunjangan tersebut akan berbeda dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Tunjangan yang menyertai sertifikasi guru diharapkan pemerintah mampu untuk mendukung guru dalam peningkatan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki agar berdampak pada kinerja guru tersebut. Jika pada kenyataannya guru menggunakan untuk pembelian barang-barang mewah seperti kredit motor dan mobil yang jauh dari tujuan adanya tunjangan tersebut maka sertifikasi guru akan berdampak pada pembentukan guru sebagai individu konsumtif. Oleh sebab itu dampak sertifikasi guru dalam pemberian tunjangan yang menjadikan guru menjadi menjadi individu konsumtif merupakan dampak yang tidak diinginkan dari adanya kebijakan sertifikasi guru.

7) Dampak kebijakan sertifikasi guru tidak hanya dampak yang dikehendaki namun juga terdapat yang tidak dikehendaki seperti adanya asumsi bahwa

sertifikasi membawa banyak pekerjaan seperti kewajiban penelitian ilmiah yang sebenarnya baik untuk kemajuan guru, tapi guru sendiri beranggapan bahwa kewajiban itu memusingkan dan menambah beban guru. Padahal penelitian ilmiah itu diharapkan pemerintah agar guru menjadi lebih aktif dalam memperdalam wawasan yang dimiliki sehingga tidak mudah untuk berpuas diri. Dengan bertambahnya wawasan yang dimiliki oleh guru bisa membantu guru dalam proses KBM di kelas karena bisa berbagi lebih banyak pengetahuan pada siswa-siswi. Sertifikasi guru dianggap oleh guru dengan persepsi yang berbeda dengan apa yang merupakan tujuan dari program ini, karena dari hasil penelitian banyak guru-guru yang beranggapan kalau sertifikasi merupakan langkah guru bisa mengaplikasikan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki agar lebih baik lagi untuk kemajuan dunia pendidikan.

- 8) Beban Kerja Dan Kewajiban Guru Menjadi Bertambah. Sertifikasi guru membawa dampak negatif pada beban kerja guru menjadi lebih bertambah dengan mengajar 24jam/minggu dan penelitian ilmiah yang dikerjakan setiap tahunnya. Guru yang bisa memenuhi 24jam/minggu maka bisa memenuhi beban kerja yang dimiliki, namun jika guru tidak bisa memenuhi 24jam/minggu maka akan menambah di sekolah lain agar tercapai 24jam/minggu. Ini membawa dampak negatif jika guru hanya menganggap kewajiban yang harus dipenuhi agar mendapatkan tunjangan tanpa mengingat tugas guru yang utama yaitu menyalurkan ilmu yang dimiliki untuk pendidikan bangsa Indonesia. Selain kewajiban

24jam/minggu ada juga kewajiban penelitian ilmiah yang harus dilakukan oleh guru setiap tahunnya. Penelitian ini membawa dampak positif karena akan menambah wawasan guru dalam pengerjaannya, namun akan membawa dampak negatif jika guru beranggapan hanya kewajiban saja yang harus terpenuhi agar tunjangan dari sertifikasi bisa terus didapat. Untuk itu guru yang berasumsi bahwa penelitian ilmiah hanya kewajiban yang harus dipenuhi tanpa menarik ilmu yang didapat maka akan berdampak negatif, karena guru akan copy paste penelitian sebelumnya untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dampak sertifikasi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme belum menunjukkan hasil yang signifikan di SDN 4 Labuhan Haji. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, memaksimalkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada dan melakukan berbagai inovasi dalam pembelajaran. Dengan demikian proses pembelajaran menjadi menarik sehingga para siswa tidak bosan dengan performa guru dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan penilaian para guru dan kepala sekolah di lokasi dimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru para guru sudah mendapat sertifikat pendidik profesional belum ada peningkatan yang berarti berkaitan keprofesionalan dalam proses belajar mengajar di kelas. Inovasi, metode, improvisasi pembelajaran masih monoton dan konvensional. Kendala yang dihadapi adalah dari dalam diri para guru sendiri, misalnya usia guru yang sudah tua dan mau pensiun, dan kemampuan guru untuk mengembangkan metode dan

inovasi pembelajaran, walaupun pihak sekolah sudah mencoba memfasilitasi para guru untuk melakukan terobosan pembelajaran.

Pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru sertifikasi di SDN 4 Labuhan Haji menunjukkan performa yang sangat baik. Dari segi proses pelaksanaan berjalan dengan lancar dan bisa dikatakan sukses. Sejak 2006 sampai 2009 tingkat partisipasi guru mengikuti sertifikasi sangat tinggi, tingkat kelulusan peserta sertifikasi guru melalui jalur portofoliodi SDN 4 Labuhan Haji sejak 2006 sampai dengan 2009 rata-rata mencapai 98,65%. Sebuah capaian angka prosentase yang sangat tinggi sehingga dari segi ouput kebijakan bisa dikatakan berhasil.

